

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah instansi keuangan mikro yang dimiliki oleh komunitas adat di Bali, yang berperan signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adat melalui akumulasi dana dan pemberian pinjaman. Kinerja suatu perusahaan bisa dilihat melalui karakteristik dari perusahaan yang di miliki (Widiartini dkk., 2020). Dalam menjalankan tugasnya, LPD sangat tergantung pada dua kegiatan utama, yaitu pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan distribusi kredit. Dana pihak ketiga, yang biasanya berasal dari tabungan penduduk desa adat, menjadi sumber utama bagi pembiayaan LPD. Di sisi lain, penyaluran kredit adalah cara penggunaan dana tersebut yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bunga sebagai sumber utama keuntungan. Keuntungan merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi performa keuangan LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah sebuah institusi keuangan mikro yang berlandaskan tradisi dan memiliki peran krusial dalam memajukan ekonomi masyarakat desa di Bali, terutama dalam memberikan layanan keuangan kepada individu yang belum terlayani oleh bank formal. Menurut Atmaja dkk., (2020) jika ada suatu usaha akan lebih efisien jika dapat mengurangi biaya transaksi serendah mungkin. Salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan dan keberlangsungan sebuah LPD adalah profitabilitas, yang menunjukkan

kemampuan LPD untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya.

Secara nyata, profitabilitas LPD sangat dipengaruhi oleh dua faktor kunci, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga merupakan sumber utama pendanaan bagi LPD yang berasal dari simpanan masyarakat desa, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Makin besar DPK yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula potensi dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan produktif, seperti penyaluran kredit kepada warga. Di sisi lain, penyaluran kredit adalah kegiatan utama LPD dalam mendistribusikan dana kepada masyarakat dengan harapan bisa mendapatkan pendapatan dari bunga yang dikenakan. Menurut penelitian yang ditulis oleh Candra, (2021) LPD ikut melakukan sumpah ditunjukkan dengan baik dan jujur supaya tidak ada niat menyelewangkan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengumpulkan DPK dan menyalurkan kredit sangat berpengaruh langsung pada tingkat profitabilitas LPD. Walaupun demikian, tidak semua peningkatan DPK dan penyaluran kredit serta-merta memberikan dampak baik terhadap profitabilitas. Masih ada risiko yang harus diperhatikan, seperti kredit macet, biaya operasional yang tinggi, atau kurangnya strategi efektif dalam penyaluran kredit yang bisa menghambat kontribusi kedua faktor tersebut terhadap peningkatan laba.

Purnamawati & Adnyani, (2021) masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam mengembangkan sesuatu. Di Desa Gunung Kangin, Kecamatan Baturiti, Tabanan, LPD berperan tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga adat yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat setempat. Fenomena yang terjadi pada LPD Desa Gunung Kangin dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya fluktuasi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan

penyaluran kredit belum berjalan secara optimal. DPK, yang merupakan sumber pendanaan utama bagi LPD dan berasal dari simpanan masyarakat desa, seharusnya mampu menjadi modal produktif untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Begitu pula, penyaluran kredit sebagai aktivitas utama LPD diharapkan menjadi motor penggerak pendapatan melalui bunga pinjaman yang diperoleh. Namun, kenyataannya, meskipun jumlah DPK yang dihimpun cukup besar dan volume penyaluran kredit terus berjalan, hal tersebut tidak secara konsisten berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas.

Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam manajemen keuangan LPD, baik dari sisi perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian risiko. Menurut Yuniarta & Purnamawati, (2020) desa dalam eksistensinya sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan kewajiban pelayanan prima dan berkualitas. Terlalu banyak menghimpun dana tanpa strategi penyaluran yang efektif dapat menimbulkan idle fund yang tidak produktif, sedangkan penyaluran kredit yang terlalu agresif tanpa pertimbangan kelayakan debitur justru berisiko meningkatkan kredit bermasalah (Non-Performing Loan) (Purnamawati dkk., 2024).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan potensi tingginya biaya operasional dan lemahnya penerapan prinsip manajemen profesional yang dapat menggerus laba. Menurut Gusti dkk., (2022) memahami dan mampu menerapkan tata kelola yang baik lebih fleksibel sesuai dengan desa. Dengan demikian, fenomena fluktuasi profitabilitas ini mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap hubungan antara DPK dan penyaluran kredit dalam menentukan kinerja keuangan LPD (Purnamawati, Musmini, dkk., 2024), sekaligus menegaskan urgensi

penelitian untuk menguji secara empiris seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut terhadap profitabilitas.

Menurut Datrini & Kade, (2020) LPD bertindak sebagai perpanjangan tangan keuangan desa untuk meningkatkan ekonomi setempat. LPD digunakan untuk menunjang bisnis setempat agar masyarakat dapat meningkatkan kondisi anggota keluarga yang membutuhkan. LPD didirikan juga untuk menyaingi pemberi pinjaman di desa setempat dan untuk membasmi rentenir, dengan menyediakan kredit murah dan sederhana. Selain itu, LPD bermaksud untuk memperbaiki sikap masyarakat dalam hal pembayaran dalam sebuah desa. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan prajuru adat adalah segera memberhentikan pengurus LPD yang bermasalah dan mengangkat pengurus LPD baru. Pengurus LPD lama harus menyelesaikan masalah sebelumnya agar pengurus bisa mengembalikan kerugian LPD yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat dari hasil musyawarah mencapai suatu kesepakatan bersama dari suatu permasalahan. Tujuannya adalah melakukan tanggung jawab keperdataan dan tetap dapat menjalin ikatan emosi dengan desa adat sebagai krama. Jadi diutamakan dilakukan penyelesaian masalah secara non litigasi sesuatu yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan konsultasi atau negosiasi dari kedua belah pihak. LPD Desa Gunung Kangin, Baturiti Kabupaten Tabanan bisa sebagai alat desa untuk unit operasional atau bisa disebut sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat penting di keluarga yang digunakan atau di manfaatkannya ditujukan kepada usaha-usaha baik menyangkut kepentingan desa maupun peningkatan hidup warga desa Gunung Kangin, meningkatkan daya beli masyarakat dan memperlancar lalu lintas pembayaran uang desa.

LPD yang bisa disebut penunjang perekonomian tidak bisa di persamakan dengan lembaga keuangan lain (Yudiaatmaja & Cipta, 2022). LPD memiliki landasan konstitusional yang berbeda khusu untuk kepentingan masyarakat desa pakraman Gunung Kangin, LPD tidak melayani masyarakat luar desa atau tempat LPD beroperasi. Sesuai dengan Peraturan daerah propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang telah di perbaharui menjadi Peraturan daerah profinsi Bali Nomor 3 Tahu 2007, sama seperti halnya dengan keuangan lainnya pengolahan LPD juga perlu hati-hati karena bila terjadi kesalahan pengolahan dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap LPD.

Dana Pihak Ketiga sebagai salah satu entitas keuangan yang mewakili Krama Desa di dalam suatu masyarakat (Ariasih & Suarmanayasa, 2024). Ekspansi dan juga kapasitasnya untuk memperkaya anggotanya secara sosial, ekonomi, budaya telah meningkatkan perekonomian Desa Gunung Kangin. Meskipun LPD mungkin tidak bisa dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain atau perusahaan publik, lembaga-lembaga keuangan yang di miliki oleh suatu desa Pakraman akan berkembang dengan pesat adanya suatu LPD yang di jalankan, LPD memerlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen profesional yang baik ini sangat penting agar manajemen menjadi efektif dan efesien mencangkup berbagai individu atau komponen yang di dalamnya (Purnamawati 2024).

LPD yang mampu mengelola dana pihak ketiga dengan efektif dan menyalurkan kredit secara tepat cenderung mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih baik. Menurut Nyoman *dkk.*, (2022) wilayah desa yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi desa kebijakan pemerintah dalam fisik lokasional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua LPD dapat mempertahankan

keseimbangan antara pengumpulan dana dan penyaluran kredit dengan cara yang optimal. Terlalu banyak menghimpun dana tanpa penyaluran kredit yang efisien dapat menyebabkan berlebihnya dana yang tidak terpakai, sedangkan penyaluran kredit yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan risiko bisa meningkatkan masalah kredit, yang akhirnya mengurangi keuntungan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan pada tingkat keuntungan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan dana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah besarnya dana pihak ketiga yang dikumpulkan serta jumlah credits yang disalurkan memiliki dampak yang signifikan terhadap keuntungan LPD.

Tabel 1.1 Jumlah LPD Setiap Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten	Tahun	Desa Adat
Kabupaten Badung	2022	124
Kabupaten Bangli	2022	170
Kabupaten Buleleng	2022	170
Kabupaten Gianyar	2022	273
Kabupaten Jembrana	2022	64
Kabupaten Karangasem	2022	190
Kabupaten Klungkung	2022	125
Kabupaten Tabanan	2022	349
Kota Denpasar	2022	35
Total		1.500

Sumber: <https://balisatudata.baliprov.go.id>

Menurut Ariasih & Suarmanayasa, (2024) pemerintah provinsi Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk mendukung kemajuan di desa adat atau desa pekraman. LPD, yang berdiri sejak tahun 1984 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1988, telah menjadi faktor penting dalam pengembangan aspek budaya, sosial, dan ekonomi di Bali. Aturan tentang LPD di Provinsi Bali diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002, yang memberikan dasar hukum yang signifikan mengungkapkan bahwa LPD di Bali

mengadopsi model koperasi Raiffeisen, yang mengedepankan kesejahteraan anggotanya. Sebagai lembaga yang kepemilikannya berada di tangan anggotanya sendiri, LPD melibatkan anggota dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan uang dan peminjam uang. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengumpulan dana, penyaluran pinjaman kepada masyarakat, serta menciptakan kesetaraan peluang bagi usaha dan lapangan kerja bagi krama desa.

Dana Pihak Ketiga (DPK), LPD desa Gunung Kangin mampu menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dan sangat meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan dari masyarakat desa terhadap adanya lembaga, namun peningkatan DPK yang terjadi tidak selalu diiringi dengan hasil peningkatan laba bersih. Dana masyarakat yang besar tidak dapat dimanfaatkan secara produktif dan optimal. Penyaluran Kredit, LPD Gunung Kangin menunjukan aktivitas biaya yang cukup agresif, terutama pada periode 2020-2023 hal ini karna peningkatan volume kredit tidak selalu mencerminkan peningkatan profitabilitas, ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kredit dan kemampuan manajemen risiko dimana upaya ini untuk memperluas pembiayaan tidak sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengendalian risiko yang memadai. Profitabilitas, fluktuasi yang terjadi mencerminkan adanya operasional dan kelemahan dalam tata kelola keuangan, total DPK dan volume kredit meningkat dan laba bersih tidak menunjukan kecenderungan yang sejalan. Hal ini memperkuat indikasi bahwa LPD Gunung Kangin menghadapi persoalan struktural yang tidak terikat dengan volume dana dan pinjaman, tetapi juga dengan kualitas manajemen internal seperti efektivitas biaya serta mampu menjaga keseimbangan likuiditas.

Menurut Sari dkk., (2024) permasalahan ini adalah salah satu risiko yang di timbulkan dari sesuatu kegiatan atau aktivitas penyaluran kredit yang dilakukan LPD kepada masyarakat desa meski demikian kredit bukan hal baru dalam mengelola keuangan mikro maupun dunia perbankan kredit sangat bermasalah untuk memengaruhi pendapatan operasional LPD. Prinsip 5C adalah lima prinsip yang harus dipertimbangkan kreditur dalam pemberian kredit kepada debitur. Prinsip ini meliputi karakter (*character*) Karakter sebenarnya menjadi kriteria awal yang akan dinilai, kemampuan (*capacity*) kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan, modal (*capital*) khususnya merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha, agunan (*collateral*) jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank, dan kondisi (*condition*) kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana dampak dana pihak ketiga dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola LPD dalam meningkatkan efisiensi manajemen keuangan serta memperkuat posisi LPD sebagai lembaga keuangan desa yang mandiri dan berkelanjutan. (Purnamawati dkk., 2023)

Menurut Abidin (2023), Dana Pihak Ketiga adalah dana yang biasanya disimpan oleh nasabah bank yang di gunakan sebagai sumber pendanaan untuk melakukan aktivitas suatu usaha. DPK berbeda dengan tabungan atau deposit, dikarenakan DPK tidak memiliki hak penarikan jaminan dari bank. Bank dapat menggunakan dana sesuai dengan kebijakan yang berlaku, bank biasanya memiliki kewajiban untuk melancarkan dan menjaga keamanan dana nasabah yang di

simpan. DPK merupakan salah satu dana yang bersumber dari masyarakat menyeluruh, dimana biasanya DPK juga sangat penting bagi sumber untuk aktivitas atau kegiatan operasional bank dan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan bank apabila bank menanggung biaya operasional dari sumber yang terjadi. Dana yang semakin banyak di himpun oleh LPD maka semakin besar pula penyaluran kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi bagi suatu LPD di bagian keuangan, akan tetapi resiko tidak di kembalikan uang yang telah disalurkan kedebitur yang bisa disebut dengan risiko kredit.

Hasil penelitian Putu Ari Marlina dkk., (2024) menemukan bahwa DPK tidak berpengaruh langsung terhadap profitabilitas, sedangkan penyaluran kredit dan kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun, penelitian ini belum mengkaji dinamika yang terjadi di tingkat desa, di mana faktor budaya, tingkat kepercayaan masyarakat, dan karakteristik ekonomi lokal dapat memengaruhi hasil yang berbeda. Penelitian umumnya menggunakan data tahunan atau periode yang relatif singkat pada penelitian Putri dkk., (2020) Padahal, fluktuasi keuangan LPD dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih pendek, bahkan setiap bulan. Penelitian ini menggunakan data bulanan selama lima tahun (2019-2023), sehingga memberikan gambaran yang lebih detail dan komprehensif terkait perubahan DPK, penyaluran kredit, dan profitabilitas.

Penelitian pada LPD di Desa Gunung Kangin penting dilakukan untuk memahami fenomena pada tingkat mikro dan memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual. Sementara itu, penyaluran kredit yang terlalu agresif tanpa analisis kelayakan dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah. Fenomena

ketidakseimbangan ini terlihat dalam data LPD Desa Gunung Kangin periode 2019-2023, di mana peningkatan DPK dan penyaluran kredit tidak selalu diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian yang menguji hubungan kedua variabel tersebut secara lebih mendalam dan terfokus pada tingkat desa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih dalam hubungan antara DPK, penyaluran kredit, dan profitabilitas dengan fokus pada tingkat desa.

Penelitian mengenai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Gunung Kangin menjadi penting karena LPD memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa, khususnya dalam menghimpun dana masyarakat melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Pada tingkat mikro, seperti desa, pengelolaan DPK dan penyaluran kredit yang kurang optimal dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan LPD dan kesejahteraan krama desa.

Namun, relitas di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan pada Dana Pihak Ketiga dan volume kredit tidak selalu disertai dengann peningkatan laba yang konsisten. Data keungan LPD di desa Gunung Kangin menunjukan bahwa walaupun Dana Pihak Ketiga menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil dan penyaluran kredit cenderung meningkat, profitabilitas justru memperlihatkan fluktuasi dan tidak menunjukkan pola kenaikan yang sebanding. Hal ini menandakan adanya masalah dalam pengelolaan dana serta efektivitas dalam penyaluran kredit. Peningkatan jumlah dana yang tidak diimbangi dengan strategi penyaluran yang efektif bisa menyebabkan adanya *idle fund*, sedangkan penyaluran kredit yang tidak berhati-hati tanpa analisis kelayakan yang tepat dapat

meningkatkan risiko kredit terhadap laba.

Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa profitabilitas LPD tidak hanya tergantung pada banyaknya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas dalam pengelolaan kredit dan pengendalian risiko. Jika kondisi ini terus berlangsung LPD berpotensi menghadapi penurunan efisiensi operasional peningkatan risiko kredit serta turunnya kepercayaan Masyarakat di desa. Oleh karena itu ini LPD Desa Gunung Kangin yang memiliki karakteristik organisasi dan social yang unik sebagai Lembaga keuangan desa adat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dilihat dari fenomena yang terjadi pada LPD Desa Gunung Kangin periode 2019–2023. Meskipun terjadi peningkatan DPK dan penyaluran kredit, kondisi tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan profitabilitas. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan dana, ekspansi kredit, dan kemampuan LPD dalam menghasilkan laba. Jika kondisi ini dibiarkan, LPD berpotensi menghadapi masalah keuangan seperti meningkatnya kredit bermasalah, penurunan efisiensi operasional, dan melemahnya kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penyaluran kredit yang terlalu agresif tanpa didukung analisis kelayakan yang memadai dapat meningkatkan risiko kredit macet, yang pada akhirnya menekan profitabilitas LPD. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menguji pengaruh DPK dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas agar dapat diketahui apakah peningkatan dana dan kredit benar-benar memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan LPD di tingkat desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelola LPD Desa Gunung Kangin sebagai dasar pengambilan keputusan dalam

mengelola DPK dan penyaluran kredit secara lebih hati-hati dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan gambaran empiris mengenai pengelolaan LPD pada tingkat desa yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengakat judul *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit terhadap Profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin, Baturiti, Kecamatan Tabanan”*.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat di hadapi dalam LPD Desa Gunung Kangin.

1. Dana pihak ketiga merupakan sumber utama pembiayaan, namun belum diketahui sejauh mana kontribusinya terhadap laba yang diperoleh LPD. LPD sangat bergantung dengan penghimpunan data masyarakat yang di sebut dengan DPK untuk menjalankan operasional masyarakat desa.
2. Penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran atau kurang efisien dapat meningkatkan risiko kredit macet dan menurunkan profitabilitas. Profitabilitas LPD biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.
3. Diperlukan analisis empiris untuk melihat korelasi atau pengaruh langsung antara DPK dan profitabilitas. LPD lokal biasanya memiliki kekurangan di kajian empiris minimnya penelitian berkaitan dengan DPK yang secara spesifik di Desa Gunung Kangin untuk mendukung studi besbasis data dengan baik dan bijaksana.

4. Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama pendapatan LPD. Kredit yang disalurkan menjadi sumber utama untuk mendapatkan bunga pinjaman LPD desa. Penyaluran kredit yang biasanya tidak efektif akan meningkatkan risiko kredit macet pada LPD, yang akan menurunkan justru profitabilitas yang memberikan dampak positif terhadap profitabilitas. Perlu ditelusuri apakah peningkatan kredit berbanding lurus dengan peningkatan laba.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di sampaikan, Penelitian hanya dilakukan pada LPD yang berada di Desa Gunung Kangin dan tidak mencakup LPD lain di luar wilayah tersebut. Variabel independen yang diteliti hanya meliputi:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu total dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Penyaluran Kredit, yaitu total nilai kredit yang diberikan oleh LPD kepada masyarakat.

Sementara itu, variabel dependen yang diteliti adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA dan variabel moderasinya adalah risiko kredit. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan LPD Desa Gunung Kangin dalam periode waktu tertentu, tergantung pada ketersediaan data. Penelitian ini tidak membahas faktor lain di luar Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit yang mungkin juga mempengaruhi profitabilitas, seperti efisiensi operasional, kualitas sumber daya manusia, risiko kredit, atau kebijakan eksternal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin?
2. Apakah penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan, Adapun tujuan dari penelitian pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Penyaluran Kredit terhadap profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin yaitu:

1. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin.
2. Mengetahui pengaruh penyaluran kredit terhadap profitabilitas LPD di Desa Gunung Kangin.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan dan perbankan

mikro, serta memperkaya referensi mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan penyaluran kredit terhadap profitabilitas lembaga keuangan desa seperti LPD. Memperkuat ilmu ekonomi yang khususnya dalam bidang salah satunya yaitu manajemen keuangan lembaga mikro lokal yang biasanya disebut dengan kata LPD. Memberikan bukti untuk Dana Pihak Ketiga (DKP) bahwa peran ini sangat penting bagi penyaluran kredit dalam meningkatkan nilai kinerja keuangan sebagai bidang dasar studi mikro yang berbasis desa adat. Teori manajemen risiko kredit biasanya berbasis di lembaga komunitas agar dapat meningkatkan karakteristik LPD yang berbeda dengan bank umum lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi LPD desa Gunung Kangin:

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam mengelola dana pihak ketiga dan penyaluran kredit agar dapat meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan. Ini juga memberikan suatu data informasi yang berbasis tentang seberapa besar pengaruh DPK dan penyaluran kredit yang telah diperoleh. Ini juga dapat sebagai acuan bahan evaluasi atau strategi pengelolaan dana kredit secara baik efisien agar dapat mengutungkan bagi LPD, contohnya menetapkan dalam suatu standar likuiditas penghimpunan dana dari masyarakat desa.

b. Bagi Pengelola LPD di Wilayah Lain:

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam mengelola keuangan secara efisien untuk mencapai kinerja yang optimal. Untuk bahan dalam mempertimbangkan penguatan kelembagaan LPD dikarenakan

penelitian tersebut menyoroti fakto kunci dalam kinerja keuangan LPD sebagai penggerak ekonpmi desa agar tidak menjadi terkendala.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam topik serupa, serta sebagai bahan literatur dalm studi terkait lembaga keuangan mikro profitabilitas. Mendorong bidang keuangan mikro berbasis lokal untuk menjadi bahan studi kasus dalam membangun mengelola dana masyarakat agar produktif dan memiliki karakteristik khas desa adat. Membuka ruang antara LPD dan lembaga keuangan lainnya seperti bank simpan pinjam atau BPR dalam efektivitas pengelolaam dana pencapaian profitabilitas.

